

QRIS dan UMKM Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Peluang Menuju Inklusi Digital ASEAN

gairah sinulingga

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia

e-mail:gslingga12@gmail.com

Abstrak

Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami percepatan signifikan sejak diberlakukannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia. QRIS dirancang sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, interoperabilitas sistem pembayaran, serta inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS, tantangan adopsi yang dihadapi UMKM, serta peluang pengembangan QRIS dalam konteks integrasi pembayaran regional ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur, analisis regulasi, serta studi kasus implementasi QRIS di Indonesia dan QR Ph di Filipina. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS berperan strategis dalam mendorong digitalisasi UMKM, namun masih menghadapi tantangan berupa literasi keuangan digital, persepsi keamanan, serta resistensi biaya Merchant Discount Rate (MDR). Integrasi sosio-teknologi dan sinergi lintas negara ASEAN menjadi faktor kunci keberlanjutan QRIS ke depan..

Kata kunci : QRIS, UMKM, sistem pembayaran digital, inklusi keuangan, ASEAN.

Abstract

The digital transformation of payment systems in Indonesia has accelerated significantly following the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) by Bank Indonesia. QRIS was developed as a national QR-based payment standard to enhance transaction efficiency, payment system interoperability, and financial inclusion, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of QRIS, the challenges MSMEs face in adopting QRIS, and future opportunities for QRIS within the ASEAN regional payment integration framework. The research employs a qualitative descriptive approach through literature review, regulatory analysis, and comparative case studies of QRIS in Indonesia and QR Ph in the Philippines. The findings indicate that QRIS plays a strategic role in accelerating MSME digitalization, although challenges remain in digital financial literacy, perceptions of security, and resistance to Merchant Discount Rate (MDR) costs. Socio-technical integration and cross-border ASEAN collaboration are critical determinants of QRIS sustainability.

Keywords: QRIS, MSMEs, digital payment systems, financial inclusion, ASEAN.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi modern. Di Indonesia, peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pembayaran nasional. QRIS menyatukan berbagai standar QR yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu standar nasional yang aman, efisien, dan inklusif.

QRIS muncul dari kebutuhan mendesak akan sistem pembayaran non-tunai yang efisien, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan teknologi oleh masyarakat. Sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, QRIS memiliki peran penting dalam mendukung visi Bank Indonesia untuk mencapai sistem pembayaran yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal) (Blueprint SPI 2025, 2023).

Lebih jauh, integrasi QRIS dalam strategi inklusi keuangan juga didorong oleh komitmen Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui kampanye nasional dan kolaborasi dengan sektor perbankan serta fintech, QRIS menjadi alat utama dalam mendorong digitalisasi UMKM (Sinulingga, 2025).

Penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif QRIS dari aspek regulasi, teknis, sosial, dan regional khususnya negara Filipina. Filipina melalui BSP juga menekankan pentingnya digital literacy dan *cyber hygiene* dalam memperluas penggunaan QR Ph. Edukasi ini tidak hanya menyasar keamanan data tetapi juga kemampuan pengguna untuk memahami hak dan kewajiban dalam transaksi digital (BSP, 2023).

Kedua negara, Indonesia dan Filipina, mengakui peran strategis sistem pembayaran digital dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM. Keduanya juga mengadopsi pendekatan bertahap yang mencakup edukasi

publik, penguatan infrastruktur, serta sinergi antar pelaku industri pembayaran.

QRIS sebagai standar nasional membawa lompatan besar dalam menjangkau segmen informal dan mikro, yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Dengan menyederhanakan proses pembayaran hanya melalui pemindaian kode QR, QRIS mengurangi hambatan administratif dan biaya tambahan yang seringkali menjadi kendala utama bagi UMKM.

Selain aspek teknis, keberhasilan QRIS juga ditentukan oleh kepercayaan pengguna. Penelitian oleh Hie (2021) menekankan bahwa transparansi biaya dan kemudahan onboarding pengguna merupakan dua faktor krusial dalam membangun adopsi digital jangka panjang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia telah membawa peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses layanan keuangan secara lebih luas. Salah satu bentuk nyata transformasi ini adalah adopsi sistem pembayaran digital melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Namun, sejauh mana kesiapan UMKM dalam mengadopsi QRIS tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi keuangan digital yang dimiliki para pelaku usaha tersebut (Bank Indonesia, 2023).

Literasi keuangan digital mencakup pemahaman terhadap instrumen keuangan berbasis teknologi serta kemampuan untuk memanfaatkannya dalam mengelola usaha dan keuangan pribadi. Dalam konteks QRIS, hal ini tidak hanya melibatkan pemahaman teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga kesadaran terhadap biaya transaksi, keamanan siber, dan perlindungan data (Sinulingga, 2025).

Studi yang dilakukan di Kota Depok mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas pelaku UMKM telah memiliki gawai yang mendukung aplikasi pembayaran digital, pemanfaatan QRIS masih terbatas. Hambatan

utama yang ditemukan antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat QRIS, kekhawatiran akan biaya tambahan, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan digital (Sinulingga, 2025).

Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2022), ditemukan bahwa hanya 42% UMKM di wilayah urban yang memahami cara kerja sistem QRIS secara menyeluruh. Sementara itu, lebih dari 60% responden menyatakan perlunya pendampingan dalam mengoperasikan aplikasi QRIS, terutama terkait fitur transaksi dan pelaporan.

Rendahnya tingkat literasi keuangan digital juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pengguna terhadap teknologi baru. Sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan transaksi tunai karena dianggap lebih mudah dan aman, padahal risiko kehilangan dan pencatatan manual justru lebih tinggi (Hie, 2021).

Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama sejumlah mitra seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), perbankan, dan institusi pendidikan telah meluncurkan berbagai inisiatif literasi digital. Salah satu program unggulan adalah Modul Ajar QRIS yang ditujukan untuk pelajar SMA dan komunitas lokal, yang bertujuan membentuk pemahaman dasar sejak dini (Bank Indonesia, 2023).

Tidak hanya dari sisi edukasi formal, pendekatan berbasis komunitas seperti pelatihan door-to-door dan pendampingan oleh agen bank turut berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha. Konsep digital ambassador yang diterapkan di beberapa kota telah terbukti efektif dalam menjangkau pelaku UMKM yang kesulitan mengikuti pelatihan konvensional (ASPI, 2023).

Dari perspektif teknologi, keberadaan aplikasi pembayaran yang user-friendly dan memiliki dukungan multibahasa turut mendorong inklusi. Aplikasi dengan antarmuka sederhana, tutorial visual, serta integrasi laporan keuangan otomatis

sangat membantu pelaku usaha yang belum terbiasa dengan proses digital.

Selain aspek teknis, pemahaman atas keamanan digital menjadi elemen penting dalam literasi keuangan digital. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan PIN, menghindari phishing, serta memverifikasi informasi sebelum melakukan transaksi (Bangko Sentral ng Pilipinas, 2023).

Filipina juga menghadapi tantangan serupa. Penerapan QR Ph mendorong otoritas moneter seperti BSP untuk menyusun strategi pendidikan digital dan cyber hygiene yang komprehensif. Mereka menekankan pada edukasi bersama antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku usaha guna membangun sistem yang terpercaya dan berkelanjutan (BSP, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode sebagai berikut:

Studi Literatur terhadap jurnal, laporan regulator, dan kebijakan Bank Indonesia serta BSP FilipinaAnalisis Regulasi QRIS berdasarkan PADG BI dan peraturan terkait Studi Kasus Komparatif implementasi QRIS di Indonesia dan QR Ph di Filipina Pendekatan Sosio-Teknologi untuk menganalisis adopsi UMKM Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika implementasi QRIS secara kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa:

- 1) QRIS berhasil meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan UMKM.
- 2) Tantangan utama meliputi literasi digital, persepsi keamanan, dan resistensi biaya MDR.
- 3) Integrasi sosio-teknologi melalui edukasi komunitas dan digital *ambassador* terbukti meningkatkan kepercayaan UMKM.

- 4) Perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan konsumen dan *cyber hygiene* memperkuat keberlanjutan sistem.
- 5) QRIS memiliki peran strategis dalam RPC ASEAN sebagai pilar interoperabilitas pembayaran ritel lintas negara.

5. KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa:

- 1) QRIS berhasil meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan UMKM
- 2) Tantangan utama meliputi literasi digital, persepsi keamanan, dan resistensi biaya MDR
- 3) Integrasi sosio-teknologi melalui edukasi komunitas dan digital ambassador terbukti meningkatkan kepercayaan UMKM
- 4) Perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan konsumen dan *cyber hygiene* memperkuat keberlanjutan sistem
- 5) QRIS memiliki peran strategis dalam RPC ASEAN sebagai pilar interoperabilitas pembayaran ritel lintas negara.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan literasi keuangan digital berbasis komunitas UMKM
- 2) Penguatan edukasi keamanan dan perlindungan konsumen
- 3) Evaluasi berkelanjutan kebijakan MDR untuk menjaga keberpihakan pada UMKM.
- 4) Penguatan kerja sama regional ASEAN dalam interoperabilitas pembayaran.
- 5) Pengembangan riset lanjutan berbasis empiris dan kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, M., Nugroho, Y., & Kurniawati, F. (2021). *Building trust in digital innovation: A socio-technical approach to payment system adoption in rural Indonesia*.

- International Journal of Innovation and Regional Development*, 10(2), 140–157
2. ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Business Roadmap Towards Epicentrum of Growth*. <https://asean.org>
 3. ASPI. (2023). Laporan Tahunan ASPI 2023: Kinerja Sistem Pembayaran Digital. Jakarta: ASPI.
 4. Bank Indonesia. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Jakarta: BI.
 5. Bank Indonesia. (2023). Modul Ajar QRIS untuk SMA. Jakarta: Bank Indonesia.
 6. Bangko Sentral ng Pilipinas. (2020). Circular No. 1055: *Adoption of National QR Code Standard*. <https://bsp.gov.ph>
 7. Bangko Sentral ng Pilipinas. (2023). *Promoting Digital Payments and Cyber Hygiene Practices. Payments Policy Department*.
 8. Hie, B. P. (2021). Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia. Jakarta: Media Nusa Creative.
 9. Ismail, M., & Francisco, J. M. (2021). Technology integration for small business resilience during the pandemic: Case study from Philippines QR system. *Asia-Pacific Journal of Innovation in Business*, 8(1), 25–34.
 10. Rahmawati, S., & dela Cruz, L. (2022). Community-based financial literacy in QR code adoption: Comparative study in Indonesia and Philippines. *ASEAN Journal of Digital Inclusion*, 3(4), 77–89.
 11. Suryani, N., & Hasan, R. (2022). Socio-technical dynamics of fintech adoption among micro-enterprises in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Economics and Technology*, 11(2), 95–112.
 12. Sihombing, A., & Nurani, Y. (2023). Inklusi Keuangan Digital melalui Bank Sampah: Studi Implementasi QRIS dalam Pemberdayaan Komunitas. *Jurnal Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif*, 7(1), 43–58.
 13. Sinulingga, G. (2025). Peningkatan Kepercayaan UMKM Kuliner Kota Depok dalam Penerapan QRIS Aman dan Murah. Depok: Nusa Litera.